

# Peran Pendidikan Politik Dalam Masyarakat Dan Kalangan Politisi Di Indonesia

Faiz Hadzanistan; Sofiansyah Farel Ardeny; Muchlis Abdul Hakim; Universitas Pasundan, [sofiansyah@gmail.com](mailto:sofiansyah@gmail.com)

*ABSTRACT: Political education is considered something important, because it is able to provide citizens with an understanding of their rights and obligations in national and state life. This political education process should start early, because political education helps shape every individual who is intelligent and critical in responding to political issues, especially when they are adults. Political education aims to increase people's political awareness so that they participate actively in the political process, especially in general elections. However, it is very unfortunate that the level of political participation in Indonesia is still relatively low because many people do not understand and do not want to know about the importance of political education. Apart from that, many people feel distrust of the political elite because they believe that Pancasila values are only used as symbols, not implemented in real policies. This resulted in a crisis of confidence in the government. Better political education can improve this situation by giving people an understanding that they have an important role in government and can influence public policy. Political education also plays a role in shaping the quality of politicians. Many politicians in Indonesia do not have an adequate educational background in politics or law, which hinders their understanding of the political system and public policy. Therefore, political education is very necessary, not only for society but also for politicians so that they better understand their responsibilities in carrying out their duties and leading with integrity. The importance of political education for prospective legislative members is also a major highlight. With the right education, they can become more responsible representatives of the people, which in turn will improve the quality of democracy and political life in Indonesia. Efforts are needed to ensure that political education becomes part of the education system in Indonesia, in order to create a society that is more active, aware and involved in the political process.*

*KEYWORDS: Political Education, Public Political Awareness, Participation In General Elections*

**ABSTRAK:** Pendidikan politik termasuk sebagai sesuatu yang penting, sebab mampu memberikan pemahaman kepada warga negara mengenai hak serta kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pendidikan politik ini sebaiknya dimulai sejak dini, karena pendidikan politik membantu membentuk setiap individu yang cerdas dan kritis dalam menyikapi isu politik, terutama saat mereka dewasa. Pendidikan politik bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat supaya mereka berpartisipasi aktif dalam proses politik, khususnya

dalam pemilihan umum. Namun sangat disayangkan, tingkat partisipasi politik di Indonesia masih tergolong rendah karena banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak ingin tahu perihal pentingnya pendidikan politik. Selain itu, banyak masyarakat yang merasa tidak percaya dengan elit politik karena mereka menilai bahwa nilai-nilai Pancasila hanya digunakan sebagai simbol, bukan diterapkan dalam kebijakan yang nyata. Ini mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pendidikan politik yang lebih baik dapat memperbaiki situasi ini dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka memiliki peran penting dalam pemerintahan dan dapat mempengaruhi kebijakan publik. Pendidikan politik juga berperan dalam membentuk kualitas politisi. Banyak politisi di Indonesia tidak mempunyai latar belakang pendidikan secara memadai di bidang politik atau hukum, yang menghambat pemahaman mereka terhadap sistem politik dan kebijakan publik. Oleh karena itu, pendidikan politik sangat diperlukan, tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk para politisi agar mereka lebih memahami tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas dan memimpin dengan integritas. Pentingnya pendidikan politik bagi calon anggota legislatif juga menjadi sorotan utama. Dengan pendidikan yang tepat, mereka dapat menjadi wakil rakyat yang lebih bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas demokrasi dan kehidupan politik di Indonesia. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa pendidikan politik menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia, guna menciptakan masyarakat yang lebih aktif, sadar, dan terlibat dalam proses politik.

**KATA KUNCI:** Pendidikan politik, Kesadaran politik masyarakat, Partisipasi dalam pemilihan umum

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan politik adalah pendidikan yang harus diberikan kepada warga negara supaya mereka mengerti hak dan kewajibannya selaku warga negara. Individu memiliki peran penting dalam pemerintahan terutama mengenai hak dan kewajiban. Pendidikan politik ini harus dimulai semenjak usia dini, sebab pendidikan tersebut akan berperan sebagai modal yang penting saat mereka menginjak dewasa. Adapun dengan mempelajari pendidikan politik mampu membawakan sebuah perubahan untuk partisipasi sekaligus kesadaran politik dari masyarakat Indonesia, yang kemudian akan mempengaruhi kebijakan serta sistem pemerintahan di negara ini.

Menurut Handoyo & Lestari. Dikutip dari buku Pendidikan Politik, 2017: 15. Tujuan dari pendidikan politik adalah untuk menciptakan warga negara yang sadar terhadap dinamika politik. Dengan bekal pendidikan tersebut, individu akan memahami hak sekaligus kewajiban mereka miliki selaku bagian dari negara. Setiap warga negara memiliki hak dalam mengutarakan pendapat mereka ke pemerintah jika kebijakan yang pemerintah ambil dianggap tidak sesuai, serta berhak untuk terlibat dalam posisi politik demi kemajuan negara.

Pendidikan politik termasuk sebagai kebutuhan yang akan warga negara perlukan dalam menunjang pemahaman politik mereka, supaya kemudian mau memberikan partisipasinya pada pemilihan umum, dengan mempergunakan hak mereka selaku warga negara. Maka dari itu pendidikan politik berperan penting untuk meningkatkan rendahnya partisipasi politik dari warga negara dalam mempergunakan hak memilih mereka dalam pemilihan umum.

Kurangnya pendidikan politik di kalangan masyarakat menjadi suatu permasalahan yang sangat diperhatikan ketika mengimplementasikan Pancasila dalam aspek politik. Karena masyarakat di Indonesia banyak sekali yang tidak ikut berpartisipasi atau tidak terlibat dalam proses politik di Indonesia, sehingga mereka kurang termotivasi untuk memahami isu-isu politik di Indonesia.

Banyak dari masyarakat tidak percaya dengan elite politik, karena menurut mereka elite politik tidak konsisten dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, hal ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan. Masyarakat akan merasa bahwa nilai-nilai Pancasila hanya menjadi jargon politik tanpa adanya pengaruh dalam keseharian ataupun kehidupan nyata.

Pendidikan politik juga mempunyai peranan yang krusial dalam menunjang kualitas politisi di Indonesia. Pendidikan politik dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang diselenggarakan guna mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta perilaku politik individu maupun kelompok dalam memahami nilai-nilai demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan etika politik yang baik. Dalam konteks Indonesia, pendidikan politik menjadi krusial mengingat sistem demokrasi yang terus berkembang membutuhkan politisi yang kompeten dan berintegritas.

Namun, dalam praktiknya, Banyak elite politik yang hanya memahami Pancasila secara simbolis, bukan substansial, mereka cenderung menggunakan Pancasila sebagai simbol dalam retorika politik untuk mendapatkan dukungan publik. Mereka sering mengutip Pancasila dalam pidato tanpa benar-benar menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan atau tindakan nyata. Dalam menentukan suatu kebijakan, elite politik tidak selaras terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti tidak adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan persatuan Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa elite politik hanya memahami Pancasila secara simbolis, bukan substansial.

Selain itu, beberapa politisi diketahui tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai di bidang politik atau hukum, sehingga pemahaman mereka tentang sistem politik dan kebijakan publik menjadi terbatas. Hal ini menjadi suatu permasalahan ketika mengimplementasikan Pancasila dalam aspek politik

Pendidikan politik untuk calon anggota legislatif itu sangat penting. Ini adalah kunci untuk menghasilkan wakil rakyat yang bertanggung jawab. Selain itu, orang-orang yang bergabung dengan partai politik cenderung lebih aktif terlibat pada dunia politik. Melalui

mengikuti pendidikan politik, mereka bisa mendapatkan pengetahuan sekaligus pengalaman yang berharga, yang akan berdampak besar bagi setiap individu yang ikut serta. Jadi, bisa dibilang pendidikan politik sangat penting dan berpengaruh bagi para calon anggota legislatif dan anggota partai politik di Indonesia.

## **II. METODE**

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif, melalui metode ini peneliti berusaha untuk menggambarkan peran pendidikan politik. Tujuan atas penelitian ini penulis menganalisis peran pendidikan politik dalam masyarakat dan kalangan politisi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, fenomenologis. Jenis penelitian yang diterapkan yakni studi literatur, sumber-sumber yang digunakan oleh penulis bersumber dari internet.

## **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

### **2.1 Teori/Konsep Partisipasi Politik**

#### **2.1.1 Pengertian Teori/Konsep Partisipasi Politik**

Menurut Isjwaja, politik itu sendiri pada dasarnya adalah proses distribusi dan pengendalian kekuasaan. Melalui keberadaan dari proses politik ini, kemudian akan muncul serangkaian peristiwa yang saling terkait yang semuanya terkait dengan kekuasaan. Dengan empat pengertian tersebut, politik melibatkan “perjuangan mendapatkan kekuasaan”, “cara-cara menjalankan kekuasaan”, “masalah terkait pelaksanaan dan pengendalian kekuasaan”, dan “pembentukan dan pemanfaatan kekuasaan”. Melalui politik, segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan kekuasaan, interaksi politik, dan relasi kekuasaan secara nyata.

Ramlan Surbakti menjelaskan, politik yakni interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat yang di dalamnya terjemmpul pernyataan dan bagan dari segala sesuatu yang terjadi selama proses pembuatan serta pembentukannya keputusan yang mengikat terkait

kebaikan bersama masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah. Ada beberapa unsur politik dari definisi politik tersebut, yang meliputi: interaksinya, adanya pemerintah atau penguasa, adanya masyarakat, adanya keputusan dan kebaikan bersama.

Sementara itu, Robert E Goodin mendefinisikan politik studi tentang politik sebagai . ‘siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana’ menyatakan bahwa itu adalah politik memicu salah satu formulasi tepercaya dari Laswell. “Hakikat politik adalah siapa yang mendapat apa, kapan dan cara” 1950. Dictionary of Politics and Government alpha memperkenalkan definisi yang berbeda tentang makna politik. ‘Politik adalah teori dan praktek tentang bagaimana cara merintah sebuah negara.

Partisipasi politik adalah kunci yang terselenggaranya demokrasi. Ia adalah kunci untuk membuka kran demokrasi suatu negara. Rata-rata usaha dimulai dengan partisipasi, namun dengan kata lain partisipasi politik itu sebagai bentuk manipulasi terhadap demokrasi itu sendiri. Jadi, kesimpulannya demokrasi dan partisipasi adalah dua dasar yang sama. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwasanya demokrasi berasal dari partisipasi

### 2.1.2 Faktor partisipasi politik

Menurut RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin. Dikutip dari jurnal Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014 (2015). Terdapat tiga faktor yang berpengaruh. Yaitu sebagai berikut:

#### 1. Faktor psikologis

Faktor psikologis adalah identifikasi individu atau masyarakat terhadap suatu partai politik. Hal ini dipengaruhi oleh orang terdekat, contohnya orang tua dan keluarga. Kemudian, faktor psikologis berkaitan dengan ketertarikan individu dalam membicarakan isu-isu yang bersangkutan dengan politik.

#### 2. Faktor ekonomi atau rasional

Faktor ekonomi tahu rasional dipengaruhi oleh pemikiran individu yang berkaitan dengan kondisi ekonomi setiap individu, keluarga, dan kondisi ekonomi negara. Dalam hal ini sangat berpengaruh kepada pilihan setiap individu, keluarga, sampai kondisi ekonomi negara dan bentuk partisipasi politiknya.

### 3. Faktor sosiologis

Faktor sosiologis hal yang berkaitan dengan pendidikan, tempat tinggal, dan tingkat ekonomi. Semua yang berkaitan sangat berpengaruh kepada partisipasi politik setiap individu dan masyarakat, khususnya untuk penentuan pemimpin dan pejabat pemerintahan di suatu negara.

#### 2.1.3 Bentuk partisipasi politik

Terdapat tiga bentuk partisipasi politik secara umum. Yaitu:

##### 1. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan secara pengajuan atau usul berkaitan dengan kebijakan umum. partisipasi politik secara aktif juga bisa dilaksanakan dengan melakukan kritik mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, membayar pajak, kemudian ikut serta dalam PILKADA.

##### 2. Partisipasi pasif

Partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi politik yang menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. contohnya menaati peraturan, dan melaksanakan semua putusan pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat hanya menaati dan mengikuti semua aturan saja, tanpa adanya pengajuan usul ataupun kritik terhadap pemerintah.

Terdapat partisipasi politik yang bisa dibedakan menjadi tiga, yakni:

*Apatis*: artinya tidak peduli dengan berjalannya proses politik.

*Spectator*: artinya hanya pernah mengikuti PEMILU saja.

*Gladiator*: artinya menjadi individu yang aktif. Misalnya, menjadi anggota partai, menjadi tim sukses PASLON, dan mempunyai peran sebagai aktivis di lingkungan masyarakat.

Partisipasi politik juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni:

1. Partisipasi politik secara konvensional

Partisipasi konvensional adalah dilakukan dengan berdiskusi politik, membentuk organisasi politik, berkampanye, dan masih banyak lagi,

2. Partisipasi politik secara non konvensional

Partisipasi non konvensional adalah dilakukan menggunakan cara demonstrasi, mogok, dan melawan tanpa adanya kekerasan.

## 2.2 Analisis

Pendidikan politik adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di setiap negara, termasuk Indonesia, pendidikan politik seharusnya diberikan kepada semua warga negara supaya mereka tahu apa saja hak dan kewajiban mereka dalam konteks kehidupan bernegara. Ini sangat penting karena setiap orang bukan hanya sekadar menjadi bagian dari masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari pemerintahan. Dalam hal ini, mereka memiliki kedudukan yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Menurut saya proses pendidikan politik itu seharusnya sudah dimulai sejak dini. Bayangkan jika anak-anak kita diajarkan tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pentingnya partisipasi dalam politik. Ini akan menjadi bekal yang sangat berharga ketika mereka beranjak dewasa. Dengan pemahaman yang baik tentang politik, mereka tidak hanya menjadi pemilih yang kritis dan cerdas, tapi mereka juga mampu berkontribusi dalam masyarakat dengan cara yang positif tidak apatis dengan negara sendiri.

Betapa pentingnya pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. Harapan saya mengenai pendidikan politik ini dapat dirasakan oleh

seluruh masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat belajar tentang politik, mereka akan mulai menyadari bahwa suara mereka memiliki arti. Kesadaran ini akan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, termasuk dalam pemilihan umum, di mana mereka bisa menggunakan hak suara mereka untuk memilih pemimpin yang mereka anggap tepat.

Namun sangat disayangkan, kita sering melihat bahwa partisipasi politik masyarakat kita masih rendah. Masih banyak orang yang tidak menggunakan hak mereka untuk memilih, dan ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan politik. Dengan mengikuti pendidikan politik, masyarakat semoga bisa meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu politik dan menjadi lebih aktif dalam menggunakan hak mereka. Pendidikan politik adalah kebutuhan yang sangat penting dan harus dipenuhi agar warga negara merasa termotivasi untuk terlibat dalam politik.

Satu hal yang menjadi suatu permasalahan yang spesifik adalah banyaknya masyarakat yang kehilangan kepercayaan kepada elite politik. Mereka merasa bahwa para pemimpin tidak konsisten dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, yang seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidakpastian ini menciptakan krisis kepercayaan. Masyarakat sering kali melihat Pancasila hanya sebagai jargon politik bagi politisi saja tanpa adanya implementasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat disayangkan karena nilai-nilai Pancasila seharusnya bisa menjadi panduan dalam setiap kebijakan yang diambil. Kemudian, kurangnya pendidikan politik di kalangan masyarakat menjadi masalah besar, terutama ketika kita berbicara tentang penerapan Pancasila dalam politik. Banyak orang yang tidak terlibat dalam proses politik, dan akibatnya, mereka kurang termotivasi untuk memahami isu-isu yang ada di sekitar mereka. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat akan sulit untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Pendidikan politik juga sangat berperan dalam membentuk kualitas politisi di Indonesia. Menurut saya pendidikan politik bukan hanya sekadar proses belajar, tetapi juga merupakan upaya untuk

meningkatkan pengetahuan, dan perilaku politik individu maupun kelompok. Ini penting agar mereka dapat memahami nilai-nilai demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan etika politik yang baik. Dalam konteks Indonesia yang terus berkembang, kita memerlukan politisi yang tidak hanya kompeten tetapi juga berintegritas.

Namun, dalam praktiknya, banyak elite politik yang hanya memahami Pancasila secara simbolis. Mereka sering menggunakan Pancasila dalam pidato politik, tetapi tidak menerapkannya dalam kebijakan atau tindakan nyata. Ketika para politisi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti menegakkan keadilan sosial dan persatuan, ini menunjukkan bahwa mereka hanya menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menarik dukungan publik.

Selain itu, ada juga masalah di mana beberapa politisi tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam bidang politik atau hukum. Ini menjadi kendala serius karena pemahaman mereka tentang sistem politik dan kebijakan publik menjadi terbatas. Tanpa pemahaman yang baik, mereka akan kesulitan dalam menerapkan Pancasila secara substansial dalam aspek politik.

Oleh karena itu, kehadiran pendidikan politik bagi calon anggota legislatif sangat penting. Melalui pendidikan politik, calon legislator dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang akan sangat mempengaruhi cara mereka berpartisipasi dalam politik. Pendidikan politik membantu mereka untuk menjadi wakil rakyat yang bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan membawa dampak positif bagi masyarakat.

Dapat diartikan bahwasanya pendidikan politik bukan hanya sekadar tambahan dalam sistem pendidikan, tetapi merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban mereka. Dengan pendidikan politik yang baik, kita dapat berharap untuk melihat masyarakat yang lebih aktif, terlibat, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ini adalah langkah penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan lebih demokratis di masa depan.

Adapun point-point yang saya analisis sebagai berikut :

1. Apa itu pendidikan politik
2. Pentingnya pendidikan politik
3. Tujuan pendidikan politik
4. Rendahnya partisipasi politik di dalam masyarakat
5. Krisis kepercayaan terhadap elite politik
6. Kurangnya pendidikan politik di kalangan politisi
7. Keterbatasan latar belakang pendidikan politik di kalangan politisi

### 2.2.1 Nilai Persatuan

Pendidikan politik sangat penting dalam persatuan, hal ini dapat membantu warga negara untuk memahami pentingnya menemukan titik tengah di dalam perbedaan setiap warga negara ketika mengikuti pemilihan umum. Dengan demikian, adanya persatuan dapat menciptakan stabilitas di dalam sistem politik yang ada di Indonesia. Ketika tidak adanya persatuan, maka perbedaan pendapat dapat menimbulkan konflik dan bisa mengancam stabilitas politik yang ada di Negara Republik Indonesia.

Pendidikan politik berperan untuk mendorong partisipasi politik Warga Negara Indonesia, walaupun di Negara Indonesia terdapat beberapa budaya, suku, ras, dan agama. Pendidikan politik dapat mempersatukan warga negara di dalam perbedaan dalam pemilihan umum. Pendidikan politik dapat menyelesaikan sebuah konflik yang dipicu karena perbedaan pendapat tanpa mengaitkan budaya, suku, ras, dan agama. Ketika masyarakat paham dengan baik terhadap politik, mereka lebih mampu untuk menyelesaikan konflik perbedaan. Hal ini penting untuk menjaga persatuan di dalam perbedaan pandangan politik

Pendidikan politik bukan sekedar alat untuk memahami sistem pemerintahan, tapi pendidikan politik merupakan sarana untuk

membangun nilai persatuan bangsa dan negara. Dengan cara mengedukasi masyarakat melalui pendidikan politik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan pentingnya partisipasi dalam politik.

Krisis kepercayaan terhadap elite politik dan kurangnya pemahaman mengenai Pancasila, hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperbaiki pendidikan politik dapat menciptakan politisi yang lebih berkualitas dan memiliki integritas, hingga mereka dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan nyata. Hal ini bisa memulihkan kepercayaan publik dan menguatkan persatuan. Menurut saya, dengan meningkatkan kualitas politisi, hal ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap ini dapat mendorong para pembuat kebijakan untuk memperhatikan pendidikan politik, dan bisa menghasilkan politisi yang kompeten dan berintegritas.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menekankan betapa pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, pendidikan politik bukanlah sekedar akademis saja, melainkan kebutuhan mendasar untuk membentuk warga negara yang aktif, cerdas dan kritis. Melalui pendidikan politik masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya secara lebih mendalam. Mereka akan mengerti bahwasanya mereka sebagai warga negara, memiliki peran yang penting di dalam pemerintahan, bukan hanya sekedar menjadi objek tetapi juga sebagai subjek yang bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di dalam negara Indonesia.

Pendidikan Politik itu sangat penting untuk kehidupan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama untuk membuat masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Partisipasi politik menjadi kunci untuk membentuk demokrasi yang sehat. Sayangnya, di Indonesia, masih banyak orang yang kurang aktif untuk terlibat dalam politik, apa karena masyarakat itu sendiri tidak paham

atau memang tidak percaya terhadap politik itu sendiri. Partisipasi masyarakat ini dipengaruhi oleh banyak hal, seperti faktor psikologis, kondisi ekonomi dan latar belakang agama dan pendidikan.

Rendahnya partisipasi politik di Indonesia disebabkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap dunia politik. Banyak warga yang tidak percaya terhadap elite politik yang menganggap nilai-nilai Pancasila hanya sebatas retorika mereka saja. Solusinya adalah memulai pendidikan politik sejak dini. Dengan cara ini generasi muda akan tumbuh menjadi individu yang mempunyai pemikiran kritis, paham akan haknya dan berani menyuarakan pendapat. Mereka akan lebih paham dalam memilih pemilu, mengkritik kebijakan, dan berpartisipasi aktif terhadap kebijakan-kebijakan politik yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, pendidikan politik harus diterapkan dengan sangat baik, masyarakat akan lebih sadar jika suara mereka sangat penting. Mereka akan lebih aktif mengikuti pemilu atau kegiatan politik lainnya. Di sisi lain, politisi juga harus lebih paham cara memimpin dengan jujur dan bertanggungjawab.

Selain kurangnya partisipasi politik di kalangan masyarakat, kurangnya pendidikan politik di kalangan politisi juga menjadi suatu masalah yang serius dalam sistem demokrasi Indonesia. Banyak politisi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang politik, hukum, atau tata kelola pemerintahan. Akibatnya, pemahaman mereka tentang konsep dasar politik, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip keadilan sosial, sering kali bersifat simbolis tanpa penerapan yang nyata. Hal ini berujung pada kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kurangnya pendidikan politik juga dapat menyebabkan politisi lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik. Padahal sebagai seorang politisi seharusnya mampu menjadi contoh dan pemimpin yang bijaksana dan jujur. Saran dan solusi dari penulis yang diambil setelah meneliti dari permasalahan tersebut ialah menyediakan program kegiatan politik bagi calon politisi dan mereka yang sedang menjabat. Dengan pendidikan yang memadai, politisi akan lebih memahami tanggung jawab mereka dan menjalankan peran mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Alfianda, A. (2022). Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Semangat Demokrasi Generasi Muda di Kabupaten Belitung Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 109–119.
- Affandi, F. N. (2018). *Pelaksanaan Program Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda* (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Dewi Handayani<sup>1</sup>, Najamudin<sup>2</sup>, Badrin<sup>3</sup> (2024). Program Sekolah Politisi Muda Sebagai Pendidikan Politik bagi Calon Anggota Legislatif di Yayasan Satunama Yogyakarta. *Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial (JMPIS)*. Vol 5 No. 3 <https://dinastirev.org/JMPIS/issue/view/86>
- Kompas.com. (2019, October 7). Mengapa pendidikan politik di Indonesia masih lemah? *Kompas.com*. Retrieved from <https://www.kompas.com>
- [Kompas.com](https://www.kompas.com) (12/07/2021)"Partisipasi Politik: Pengertian, Teori, Faktor, dan Bentuknya", <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/12/153000269/partisipasi-politik--pengertian-teori-faktor-dan-bentuknya>.
- Mulyadi, Y., & Anyan, A. (2019). *Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa*. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 9(1), 33-38.
- Handoyo & Lestari, 2017: 15). *Pendidikan politik*. Yogyakarta: Pohon cahaya.
- karya RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, (2015). *Jurnal Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014*.
- Goodin, Robert E. & Klingemann, Hans-Dieter. (ed), *Handbook of Political Science* New York: Oxford University Press, 1998
- Isjwara, F. Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Binacipta, 1982.

[Nur Rohim Yunus, Muhammad Sholeh, Ida Susiolawati. \(Januari 2017\).  
Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik  
Negara. \*Jurnal Sosial dan Budaya Syar i\*, 4 \(3\)](#)

Liando, D. M. (2016). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ( Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014 ). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/viewFile/17190/16738>

Hermawan. (2007). Esensi Pendidikan Politik dan Kaitannya dengan Pembentukan Warga Negara yang Baik. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 15 (29), 26-34.

Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1144.

Handaningrum, R., & Rini, R., A., P. (2015). Persepsi terhadap kualitas calon legislatif dan kepercayaan politik (political trust) dengan partisipasi politik. *Jurnal Psikologi Indonesian*, 3(3), 223-236. Doi: 10.30996/persona.v3i03.1578. Retrieved from <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona/article/view/1578/1337>

Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2). 3217-3225.